

DAFTAR PUSTAKA

- Alting, Husein, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*. Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2010.
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ardiwilaga, R. R., *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Masa Bakti, 1960.
- Arisaputra, Muhammad Ilham, *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bushar, Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Difinubun, A. dkk. Tim Penyusun Sejarah, *Hukum Adat Larvul Ngabal*, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, 2008.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Florus, Paulus, dkk. *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta: Grasindo, 1994.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni, 1982.
- Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1980.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Hartono, Sunaryati. "Pengaturan Hak Ulayat Di Dalam UUPA Yang Baru," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 9, (April 1999), 16.

- Huda, Ni'matul. "Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Hukum UII*, Vol. 13 No. 7 (April 2000).
- Ismail, Nurhasan, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*. Malang: Setara Press, 2018.
- Leirrisa, *Sejarah Kebudayaan Maluku*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Lestawi, I Nengah, *Hukum Adat*. Surabaya: Paramita, 1999.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Cet. 5. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nugroho, Bambang Daru, *Hukum Adat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Pide, A. Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Rahail, J.P., *Bat Batang Fitroa Fitnangan, Tata Guna Tanah dan Laut Tradisional Kei*. Jakarta: Sejati, 1995.
- Larwul Ngabal*. Jakarta: Yayasan Sejati, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Renjaan, Victor. Wawancara dengan penulis, Ohoibun, Maluku Tenggara, 10 Mei 2019.
- Ruchiyat, Eddy, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*. Bandung: Alumni, 1995.
- Safitri, Myrna A. "Legalisasi Hak-hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah dan Rekomendasi" dalam VVI, Universitas Leiden dan Bappenas, "Masa

Depan Hak-hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum”. Jakarta: VVI, Universitas Leiden dan Bappenas, 2011.

Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.

Seokanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Meninjau Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Soeroengan, 1954.

Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2005.

Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2002.

Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Sumardjono, Maria S.W. “Ihwal Hak Komunal atas Tanah”, (On-Line). Tersedia di WWW.<https://properti.kompas.com/read/2015/07/06/150450221/Ihwal.Hak.Komunal.atas.Tanah?page=all> (11 Mei 2018).

Sutantio, Retnowulan & Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, di-Indonesiakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Titahelu, R.Z. “Hukum Adat Maluku dalam Konteks Prularisme Hukum Implikasi Terhadap Manajemen Sumber Daya Alam Maluku,” Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum, Universitas Pattimura Ambon, 2005.

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet I. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1979; Cet II. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989,

Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Ketentuan Tambahan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diubah atau diamandemen).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah.

Peraturan Menteri ATR Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Penguasaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah.

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Aponno, Adolf. Wawancara dengan penulis, Ohoijang, Maluku Tenggara, 20 Mei 2019.

Esomar, Vallen. Wawancara dengan penulis, *Ohoi* (Desa) Wain, Maluku Tenggara, 1 Mei 2019.

Leisubun, Mohammad Don. Wawancara dengan penulis, *Ohoi* (Desa) Wain, Maluku Tenggara, 11 Mei 2019 dan 15 Mei 2019.

Sumber data umum Kepala (*Ohoi*) Desa Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.

Tengko, Hengky. Wawancara dengan penulis, Langgur, Maluku Tenggara, 01 Mei 2019.